



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

KOMISI VI DPR RI

BIDANG INDUSTRI, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UKM, BUMN, DAN INVESTASI

Rapat ke	:	24 (<i>dua puluh empat</i>)
Tahun Sidang	:	2020-2021
Masa Persidangan	:	V
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero)
Hari, Tanggal	:	Senin, 21 Juni 2021
Pukul	:	13.00 WIB
Sifat Rapat	:	Terbuka
Pimpinan Rapat	:	Mohamad Hekal, M.B.A., Wakil Ketua Komisi VI DPR RI
Sekretaris Rapat	:	Dewi Resmini, S.E., M.Si., Kabagset. Komisi VI DPR RI
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi VI DPR RI, Gedung Nusantara I Lt. Dasar Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
A c a r a	:	Pembahasan Kinerja Perusahaan PT. Garuda Indonesia (Persero).
Hadir	:	1. orang dari 54 Orang Anggota Komisi VI DPR RI; 2. Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero), beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Ketua Rapat membuka Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero), pada pukul 14.35 WIB dan rapat dinyatakan tertutup untuk umum.
2. Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Senin, 21 Juni 2021, dengan acara dan waktu sebagaimana tersebut di atas, dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Mohamad Hekal, M.B.A.

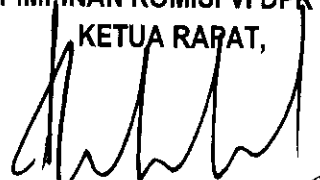
II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VI DPR RI menerima penjelasan Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) terkait dengan *strategic roadmap* dalam rangka penyelamatan perusahaan.
2. Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero) untuk memfinalisasi rencana opsi-opsi penyelamatan terkait restrukturisasi perusahaan dengan Kementerian BUMN RI, serta melaporkan secara berkala kepada Komisi VI DPR RI.
3. Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero) untuk melakukan efisiensi perusahaan secara cepat dan maksimal untuk meminimalisir kerugian operasional.
4. Komisi VI DPR RI meminta PT Garuda Indonesia (Persero) melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menyelamatkan perusahaan, antara lain:
 - a. Negosiasi dengan lessor;
 - b. Restrukturisasi utang perusahaan;
 - c. Penyelesaian dengan karyawan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
5. Komisi VI DPR RI mengapresiasi kebijakan perusahaan menetapkan tarif yang disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan (SBM) Kementerian Keuangan RI.
6. Komisi VI DPR RI menyerukan agar seluruh perjalanan dinas yang bersumber dari APBN dan APBD untuk mempergunakan pesawat Garuda Indonesia dan Citilink.
7. Komisi VI DPR RI memberikan waktu kepada PT Garuda Indonesia (Persero) untuk menyampaikan jawaban secara tertulis paling lama 10 (*sepuluh*) hari kerja atas pertanyaan Anggota Komisi VI DPR RI.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pada pukul 17.29 WIB.

PIMPINAN KOMISI VI DPR RI
KETUA RAPAT,



MOHAMMAD HEKAL, M.B.A. *of*

A-103